



Upaya Pemberdayaan Bisnis Skala Kecil Pariwisata Bali Berkelanjutan pada Era New Normal

Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2023

Vol. 04 (1), 16-25

© The Journal, 2023

DOI: 10.36256/ijtl.v4i1.299

<https://journal.lasigo.org/index.php/IJTL>

Lasigo Journal

Article History

Received : January 1st, 2023

Revised : March 8th, 2023

Accepted : April 15th, 2023

I Gede Sutarya

Program Studi Magister Pariwisata Budaya dan Keagamaan, Program Pascasarjana, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali, Indonesia

igedesutarya20@gmail.com

I Nengah Suardhana

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia

nengahsuardhana@undiknas.ac.id

I Gusti Bagus Rai Utama

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

raiutama@undhirabali.ac.id

ABSTRACT

Bali tourism was experiencing difficult times with minus growth during the pandemic in 2020 and 2021. In 2022, Bali tourism has not recovered as before yet. This proves that the Bali tourism development model based on mass tourism cannot provide comfort and security for the people of Bali. Amid this crisis, it was difficult for Balinese people to return to the agricultural sector due to the decline in agricultural land. Therefore, finding a model for tourism development in Bali for the future was a serious matter. This model must also touch on the philosophy of tourism development in Bali, namely *Tri Hita Karana*. The results of the analysis show that this philosophy cannot work in the context of mass tourism development. This philosophy can only work in small-scale rural tourism development. Therefore, the ideal Bali tourism model was a small-scale rural tourism model. This model was also threatened by the development of mass tourism. Therefore, the government must pay more attention to the development of small-scale tourism businesses, which were stronger in times of crisis because the small-scale business model was a model of sustainable tourism development in the new normal era.

Keywords: Bali Tourism; Small Scale; Sustainable Tourism; New Normal

ABSTRAK

Pariwisata Bali mengalami masa-masa sulit dengan pertumbuhan minus pada masa pandemic tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, pariwisata Bali belum bisa pulih seperti semula. Hal ini membuktikan bahwa bentuk pembangunan pariwisata Bali yang berbasis pariwisata massal tidak bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Bali. Di tengah krisis tersebut, masyarakat Bali sudah sulit untuk kembali ke sektor pertanian karena penurunan lahan pertanian. Karena itu, menemukan bentuk pembangunan pariwisata Bali untuk masa depan adalah persoalan serius. Bentuk ini juga harus menyentuh falsafah pembangunan pariwisata Bali

Corresponding Author

Name : I Gede Sutarya

Email : igedesutarya20@gmail.com

yaitu Tri Hita Karana. Hasil analisis menunjukkan falsafah ini tidak bisa berjalan dalam konteks pembangunan pariwisata massal. Falsafah ini hanya bisa berjalan dalam pembangunan pariwisata berskala kecil pedesaan. Karena itu, bentuk pariwisata Bali yang ideal adalah bentuk pariwisata berskala kecil di pedesaan. Bentuk ini terancam juga dengan pengembangan pariwisata massal. Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada pengembangan bisnis pariwisata berskala kecil, yang ternyata lebih kuat menghadapi masa-masa krisis sebab bentuk bisnis berskala kecil adalah bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan pada era new normal.

Kata Kunci: Pariwisata Bali, Skala Kecil, Pariwisata Berkelanjutan, New Normal

1. Pendahuluan

Pariwisata Bali mengalami pertumbuhan minus pada masa pandemic tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan tahun 2022 juga belum memulihkan kondisi Bali seperti sebelum pandemic. Karena itu, ekonomi Bali mengalami persoalan serius karena ketergantungan kepada pariwisata. Mengurangi ketergantungan Bali terhadap pariwisata adalah persoalan sulit sebab lahan-lahan pertanian terus menurun akibat desakan industri pariwisata dan penambahan penduduk. Karena itu, Bali sudah sulit kembali kepada sektor pertanian kembali. Tenaga kerja Bali juga sudah mulai meninggalkan pertanian. Persoalan ini ditambahkan dengan berbagai persoalan-persoalan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pertanian. Akan tetapi, menggeluti pariwisata juga merupakan persoalan tersendiri di tengah-tengah kondisi lingkungan yang semakin mendesak Bali. Karena itu, Bali perlu melakukan penataan ulang terhadap pariwisata Bali (Utama, Wirateja, & Turker, 2021).

Kajian-kajian terhadap pariwisata Bali menunjukkan bahwa Bali hanya bisa menulis kalimat-kalimat indah dalam peraturan daerah tentang kepariwisataan budaya. Pada peraturan daerah tersebut, ditulis kepariwisataan budaya Bali berlandaskan falsafah Tri Hita Karana, tetapi pada kenyataannya falsafah ini telah termarginalkan mulai dari promosi tentang pariwisata Bali (Udayana, 2017). Pada aspek budaya, marginalisasi ini muncul dalam bentuk komodifikasi budaya. Contohnya komodifikasi tarian sakral Sanghyang Dedari (Ruastiti, 2015). Pada aspek lingkungan terjadi bencana-bencana yang menunjukkan ketidakseimbangan lingkungan. Karena itu, falsafah Tri Hita Karana tidak bisa berjalan dalam skala besar pariwisata Bali. Pada skala kecil, falsafah ini dapat berjalan. Contohnya pada kasus pariwisata pedesaan di Sudaji, Buleleng (Dewi, 2019). Pariwisata pedesaan ini dapat mengikuti falsafah Tri Hita Karana sepanjang tidak dibuka untuk pariwisata massal. Contohnya adalah wisata pedesaan Ubud yang kini dibuka untuk pariwisata massal sehingga menimbulkan persaingan usaha-usaha local homestay dengan hotel-hotel besar (Pitanatri & Pitana, 2019).

Pariwisata budaya Bali berjalan ideal dalam skala kecil yaitu pedesaan, tetapi pemerintah terus mengembangkan pariwisata massal. Pariwisata pedesaan bahkan berpotensi diserang pariwisata massal seperti kasus Ubud. Serangan ini menimbulkan persoalan pada masa-masa krisis pariwisata Bali seperti tahun 2020 dan 2021. Pada masa itu, pengangguran terjadi di mana-mana tetapi pariwisata massal tak bisa berkuat. Pemerintah juga tidak bisa memberikan subsidi yang memadai bagi pengangguran tersebut, sehingga dugaan kalau terjadi pelarian modal ke luar pada kasus pariwisata massal menjadi kuat di tengah-tengah krisis yang berlangsung. Pariwisata Bali seharusnya memiliki tabungan untuk mengatasi masa-masa krisis, tetapi kenyataannya tidak. Bahkan raksasa-raksasa pariwisata justru meminta perlindungan pada masa-masa krisis (Utama, Laba, et al., 2021). Hal ini membuktikan pariwisata massal mengalami masalah pada masa-masa krisis. Artikel ini bertujuan menggambarkan kekuatan Bali dalam pembangunan pariwisata, dengan mengembangkan bentuk-bentuk yang mendekati untuk pembangunan pariwisata Bali di masa depan. Hal ini penting karena berkaca dari kegagalan Bali dalam

menghadapi masa-masa krisis. Bentuk ini diperlukan untuk membangun masa depan Bali sehingga peristiwa krisis tersebut tidak terulang lagi.

2. Kajian Pustaka

Dampak negatif pembangunan pariwisata di seluruh dunia menyebabkan dicanangkannya pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah bagian dari konsep umum pembangunan berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah konsep pembangunan pariwisata yang memanfaatkan berbagai sumber daya dengan memperhatikan kepentingan masa depan. Karena itu, pariwisata berkelanjutan bertumpu pada konservasi sumber daya alam, masyarakat lokal, dan ekonomi lokal (Utama, 2015); (Fuchs, 2022). Pada berbagai kasus, pariwisata berkelanjutan merupakan jawaban atas isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim (Dubois, Bossew, Tollefsen, & De Cort, 2010). Isu-isu lingkungan ini berhubungan dengan isu-isu budaya lokal dan masyarakat lokal, sebab budaya lokal dan masyarakat lokal merupakan pembangun tradisi pelestarian alam. Isu-isu lokal ini membangun aspek sosial budaya daripada pariwisata berkelanjutan (Nhuta, 2015), sehingga masyarakat lokal dan ekonomi lokal juga menjadi elemen-elemen pariwisata berkelanjutan. Karena itu, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan masa kini dengan komitmen yang kuat dalam menjaga kepentingan masa depan secara adil.

Di tengah-tengah isu pariwisata berkelanjutan pasca pandemic muncul era new normal. Era new normal adalah suatu masa yang berfokus kepada aspek kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang dilakukan pasca pandemic covid 19. Karena itu, pariwisata new normal adalah perjalanan wisata yang berfokus kepada protocol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker (Benjamin, Dillette, & Alderman, 2020); (Melo et al., 2022). Fokus kesehatan ini berorientasi kepada konservasi lingkungan dan bisnis berskala kecil, sehingga berpeluang bagi pembangunan masyarakat lokal (Fuchs, 2022). Hal itu terjadi karena mengurangi pencemaran udara dengan menggunakan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital ini memberikan peluang bagi usaha ekonomi menengah ke bawah. Karena itu, dalam artikel ini, era new normal dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas yang berfokus kepada protokol kesehatan.

Pariwisata berkelanjutan pada era new normal dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan, memelihara sumber daya alam, dan memformat pariwisata berkelanjutan sebagai pertumbuhan ekonomi. Pelibatan masyarakat lokal dalam kebijakan diperlukan, sebab masyarakat lokal memiliki peranan penting dalam mengembangkan usaha ekonomi menengah dan kecil. Usaha-usaha kecil ini memiliki peluang pada era new normal, sebab era ini memberikan ruang yang besar terhadap usaha kecil dan menengah untuk mengakses pasar (Utama & Trimurti, 2020). Kasus Thailand menunjukkan bahwa usaha-usaha kecil memiliki peluang pada era new normal, karena bisnis kecil dan menengah ini memiliki daya adaptasi yang lebih baik (Fuchs, 2022). Pada konteks Bali, pelibatan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan ekonomi lokal berhubungan dengan filsafat pembangunan pariwisata Bali. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya menyatakan filsafat pariwisata budaya Bali adalah Tri Hita Karana. Tri Hita Karana adalah hubungan harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam (Astuti, Wayan, Windia, & Lestari, 2015). Harmoni dengan Tuhan menyangkut keharmonisan dengan budaya lokal. Harmoni dengan sesama manusia menyangkut keberpihakan terhadap ekonomi lokal. Harmoni dengan lingkungan menyangkut konservasi lingkungan. Hubungan harmoni dibangun untuk membangun masyarakat Bali yang sejahtera sesuai tujuan pembangunan pariwisata Bali (I. Pitana, 2010).

Pada pelaksanaannya, falsafah Tri Hita Karana termarginalisasikan dalam pariwisata budaya Bali, sebab pariwisata budaya Bali bersifat kapitalistik. Contohnya promosi pariwisata Bali bertujuan menjual Bali dengan mendatangkan wisman sebanyak-banyaknya, sehingga falsafah

Tri Hita Karana termarginalkan (Astiti et al., 2015). Marginalisasi falsafah Tri Hita Karana terjadi pada pariwisata Bali secara umum, tetapi pada kasus pariwisata pedesaan seperti Desa Sudaji-Buleleng, falsafah Tri Hita Karana menjadi basis pembangunan pariwisata pedesaan berkelanjutan. Hal itu terjadi karena pariwisata pedesaan berbasis potensi lokal, kebijakan local, dan lingkungan alam sekitar (Anggana, Mudana, Triyuni, & Sukmawati, 2022). Karena itu, Tri Hita Karana menjadi fondasi pembangunan pariwisata pedesaan berkelanjutan, walaupun pariwisata Bali bercirikan kapitalistik secara umum. Hal ini menunjukkan pariwisata berkelanjutan dengan falsafah Tri Hita Karana bisa diterapkan dalam skala kecil yaitu pariwisata pedesaan. Contoh di Thailand menunjukkan hal yang sama bahwa pariwisata berkelanjutan bisa dilaksanakan dalam pariwisata pedesaan (Hitchcock & Putra, 2007). Kasus di Desa Nqileni, Afrika Selatan juga menunjukkan bahwa pariwisata berkelanjutan berpotensi pada pariwisata pedesaan, sebab memerlukan partisipasi aktif masyarakat local (Setokoe & Ramukumba, 2022).

Studi pada pariwisata Bali menunjukkan bahwa pariwisata pariwisata berkelanjutan tak bisa dilaksanakan secara makro, tetapi bisa diaplikasikan dalam konteks pariwisata pedesaan. Hal itu terjadi karena menghubungkan pariwisata dalam konteks makro dengan masyarakat local dan lingkungan merupakan hal yang sulit. Karena itu, pariwisata berkelanjutan dalam konteks makro hanya merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya pengelolaan dampak lingkungan pada hotel-hotel berbintang di Bali (Pramono, 2016). Relasinya pada masyarakat local, masih merupakan pertanyaan besar. Karena itu, pariwisata berkelanjutan adalah hanyalah konsep yang aplikasinya belum teruji (Liu, 2003). Bentuk-bentuk pariwisata berkelanjutan hanya bisa dilakukan dalam skala-skala kecil pedesaan, sebab relasinya dengan masyarakat local sangat tampak. Pada kasus pariwisata makro, relasi dengan masyarakat local ini belum jelas sebab berhubungan dengan kapital yang besar dan tenaga-tenaga profesional. Kapital yang besar dan tenaga-tenaga profesional ini berhubungan dengan pariwisata massal yang didukung Orde Baru (I Gede Pitana, 2009). Pada kasus di Ubud, masyarakat local yang mengelola homestay ternyata memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pariwisata massal yang berkembang karena keunikannya dalam pelayanan (Pitanatri & Pitana, 2019). Karena itu, di tengah-tengah pariwisata massal, masyarakat local harus mampu menunjukkan keunikannya sehingga menjadi daya tarik utama pariwisata. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang kepada masyarakat local untuk melawan pariwisata massal dengan keunikannya (Nie et al., 2022).

Pada era new normal, peluang masyarakat local menjadi lebih besar sebab penggunaan teknologi digital semakin besar. Teknologi digital ini berperan dalam pemasaran sehingga memberikan akses yang sama kepada semua produsen besar dan kecil. Hal itu terjadi karena perubahan perilaku konsumen di dalam membangun keputusan untuk membeli produk. Konsumen mulai mencari informasi lengkap pada iklan-iklan online (Schutte & Chauke, 2022). Pada kasus pariwisata, hal ini telah memotong mata rantai pemasaran pariwisata sehingga peran biro perjalanan menjadi semakin sempit. Contohnya pada pembelian tiket pesawat dan hotel, wisman kini bisa memesan langsung melalui aplikasi digital. Pemesanan digital ini didukung sistem keuangan yang digital, sehingga beberapa rantai pemasaran pariwisata terputus. Hal ini telah membangkrutkan bisnis-bisnis biro perjalanan besar. Contoh kasus terbesar pada abad ini adalah bangkrutnya Biro Perjalanan Thomas Cook yang merupakan biro perjalanan tertua di dunia. Permasalahan pada bisnis pariwisata massal memberikan peluang kepada bisnis pariwisata kecil dan menengah, sebab bisnis kecil dan menengah ini lebih adaptif menghadapi berbagai perubahan. Pada kasus di Thailand, bisnis kecil dan menengah ini terbukti adaptif pada era new normal (Fuchs, 2022).

3. Metode Penelitian

Untuk mengetahui Bentuk Pemberdayaan Bisnis Skala Kecil Pariwisata Bali Berkelanjutan pada Era New Normal, peneliti menggunakan metode kualitatif secara utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian ini menggunakan penelitian sekunder yang tersedia di berbagai publikasi

ilmiah yang terkait dengan pariwisata usaha kecil dan menengah. Sedangkan data dan informasi yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif.

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan kerangka teori pendukung dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian saat ini dan kondisi Bali. Analisis dibatasi oleh kerangka social engineering on business and small business sustainability terkait pariwisata di masa pandemi covid-19 di Bali. Hasil analisis dipaparkan dan dijelaskan secara sistematis dengan penjelasan kualitatif, terkait teori dan kelangsungan usaha kecil menengah khususnya usaha pariwisata di masa pandemi Covid-19.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Pariwisata Bali Menuju New Normal

Pada tahun 2020 dan 2021, pariwisata Bali mengalami masalah besar. Kunjungan wisman menurun drastis. Pada tahun 2019, kunjungan wisman berjumlah 6.275.210. Pada tahun 2020, kunjungan wisman menjadi 1.069.473. Pada tahun 2021, kunjungan wisman menjadi 51 orang. Penurunan kunjungan wisman ini tidak diikuti penurunan drastis kunjungan wisnu. Tahun 2019, kunjungan wisnu 10.545.039. Pada tahun 2020, kunjungan wisnu 4.596.157. Pada tahun 2021, kunjungan wisnu 4.301.592 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022). Data ini menunjukkan, pada tahun 2020 dan 2021, kunjungan wisatawan ke Bali terdorong kunjungan wisnu, yang walaupun menurun tetapi tetap mengisi di tengah penurunan wisman. Penurunan kunjungan wisman dan wisnu ini berdampak kepada ekonomi Bali. Pada triwulan pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bali -9,85 persen (Bali Post, 5/5/2021). Pertumbuhan minus ini akibat turunnya kunjungan wisman pada tahun 2020. Pertumbuhan minus ini akibat dari masalah besar dari pariwisata Bali pada era covid 19 (tahun 2020 dan 2021). Tahun 2022, kunjungan wisman mencapai 2.124.226 dan kunjungan wisnu mencapai 10.940.928 orang (BPS Bali, 2023).

Pertumbuhan minus ini berdampak kepada kerusakan lingkungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberitakan banjir bandang menerjang bencana pada 17 Oktober 2022. Banjir ini menghanyutkan batang-batang kayu besar. Batang-batang kayu tersebut berasal dari hutan-hutan yang dicuri masyarakat (BNPB, 2022). Hutan Kintamani juga mengalami masalah pemukiman yang merangsek dan menjadi tempat pembuangan sampah (Mongabay, 2021). Hutan Bedugul juga mengalami masalah tanah longsor dan sampah akibat peningkatan aktivitas masyarakat (Mongabay, 2021). Contoh-contoh kasus ini menunjukkan kerusakan alam Bali akibat keadaan ekonomi masyarakat yang mengalami krisis. Kesempatan pada industri pariwisata menurun sehingga mereka mencari celah-celah lain yang mengganggu kelestarian alam.

Masyarakat Bali sudah terlambat untuk kembali ke pertanian. Lahan pertanian terus menurun akibat desakan pemukiman dan perkembangan industri pariwisata. Lahan pertanian di Bali berkurang sekitar 600 – 1.000 hektar setiap tahun karena desakan pemukiman dan perkembangan industri pariwisata. Petani Bali saat ini paling luas memiliki lahan sekitar 75 are. Petani yang memiliki lahan pertanian di atas 1 hektar sangat jarang (Bisnis.com, 2022). Badan Pusat Statistik Bali (BPS Bali) mencatat luas panen persawahan di Bali sekitar 103.788 hektar pada tahun 2021. Produksinya mencapai 611.456 ton pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022). Harga-harga hasil pertanian juga tidak sesuai sehingga petani terus mengeluhkan ketidaksesuaian harga. Contohnya petani Kintamani yang mengeluhkan jebloknya harga hasil pertanian (FAJAR BALI.com, 2021). Hal ini menunjukkan masyarakat Bali sudah terlambat untuk kembali pada sektor pertanian, kecuali ada terobosan-terobosan besar dalam bidang pertanian.

Hal ini mengharuskan Bali kembali ke pariwisata, sebab investasi pada pariwisata sangat besar. Saat ini (2022), Bali memiliki 403 hotel berbintang dan 551 hotel non bintang. Investasi pariwisata ini menyebabkan penduduk Bali berjumlah sekitar 1.339.515 bekerja pada sektor jasa, sedangkan jumlah seluruh penduduk Bali yang bekerja adalah 2.441.854 (Badan Pusat Statistik

Provinsi Bali, 2020). Data ini menunjukkan ketergantungan besar pada sektor jasa (pariwisata). Ketergantungan ini mempengaruhi masalah-masalah lingkungan dan budaya. Masalah lingkungan adalah keterdesakan ruang seperti pada kasus-kasus perusakan hutan. Masalah budaya telah terjadi komodifikasi budaya, yaitu proses menjadikan budaya sebagai komoditi. Contoh kasusnya adalah pementasan Tari Sanghyang Dedari yang untuk mendapatkan nilai ekonomi dari pariwisata (Ruastiti, 2015). Komodifikasi seperti ini adalah bagian dari manipulasi budaya dalam pariwisata (I Gde Pitana & Gayatri, 2005).

Komodifikasi budaya ini telah menimbulkan berbagai kasus pelecehan benda-benda sakral di Bali. Bali Tribune (13/8/2019) memberitakan kasus sepasang wisman membersihkan pantatnya pada tempat pengambilan air suci di Ubud. Detiknews (16/10/2019) memberitakan foto viral wisman yang menduduki tempat suci pada suatu pura. NusaBali.com (12/6/2022) memberitakan tentang konten wisman yang menaiki pohon beringin yang disucikan umat Hindu. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa wisman telah memandangi benda-benda sakral tersebut bersifat sekuler karena menjadi bahan promosi pariwisata. Karena itu, komodifikasi budaya telah mengubah makna benda-benda sakral sebagai benda-benda sekuler dalam pandangan wisman.

Komodifikasi ini diikuti promosi besar-besaran budaya Bali untuk pariwisata. Kompas.com (2022) memberitakan, Pemprov Bali menyiapkan 2.500 penjor untuk KTT G20. Pada kasus KTT G20 ini, penjor menjadi ikon penyambutan tamu-tamu negara, padahal penjor adalah perlengkapan upacara. Promosi tari-tarian Bali dan berbagai ornamen lainnya yang digunakan untuk upacara keagamaan Hindu hadir dalam ruang-ruang meeting sekuler. Bali memiliki aturan penggunaan symbol-simbol tersebut untuk tujuan sekuler, dengan mengurangi beberapa item penting tetapi pada pandangan wisman hal itu sama. Pandangan wisman terhadap kesamaan benda itu tercermin dari perilaku wisman yang tidak sopan pada tempat-tempat suci.

Promosi besar-besaran ini tidak akan bisa menghentikan komodifikasi dan kerusakan lingkungan ini, sebab investasi pariwisata yang memerlukan budaya dan lingkungan alam. Pariwisata yang menggunakan budaya dan lingkungan alam Bali ini seharusnya mensejahterakan masyarakat Bali, tetapi ternyata tidak teruji pada masa-masa pandemic. Masyarakat Bali mengalami penderitaan paling parah pada masa pandemic, dengan pertumbuhan minus (-) 9 lebih. Karena itu, surplus pada masa-masa ramai pariwisata, tidak menjadi tabungan bagi masyarakat Bali pada masa pandemic. Pemerintah daerah yang memungut PHR pada pariwisata, juga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memulihkan ekonomi masyarakat pada masa pandemic. Pemkab Badung hanya memberikan insentif Rp.600 ribu perbulan untuk tenaga kerja pariwisata yang kena PHK (badungkab.go.id, 2020).

4.2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Bali

Pariwisata Bali mengalami masalah pada masa pandemic sehingga berakibat pada pertumbuhan ekonomi minus 9. Masalah pariwisata Bali melengkapi masalah-masalah lingkungan dan sosial budaya yang terjadi pada pulau Bali ini. Masalah lingkungan seperti penurunan kualitas dan kuantitas hutan. Penurunan kualitas dan kuantitas hutan menimbulkan bencana-bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Konservasi lingkungan semakin sulit dilakukan, sebab pertumbuhan industri pariwisata semakin boros lahan, sehingga mengkonversi lahan pertanian menjadi tempat fasilitas pariwisata dan pemukiman. Ketergantungan Bali kepada pariwisata pada aspek budaya telah menyebabkan munculnya komodifikasi budaya. Komodifikasi budaya ini telah berimplikasi kepada menurunnya penghargaan wisatawan kepada budaya Bali, yang terbukti dari kasus-kasus perbuatan menduduki tempat suci. Di tengah-tengah kerusakan lingkungan dan budaya ini, Bali tak bisa kembali lagi kepada pertanian sebab berkurangnya jumlah lahan pertanian yang terus bertambah setiap tahun. Karena itu, Bali tergantung kepada pariwisata (Utama et al., 2022).

Dampak-dampak negatif pariwisata ini terjadi karena pengelolaan pariwisata Bali yang kapitalistik. Bali sangat tergantung kepada investasi asing. Kapitalisme yang berlangsung juga

kapitalisme yang tidak diimbangi pengelolaan pemerintah yang baik. Pada masa-masa pariwisata Bali mengalami booming maka pemilik modal mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi pada masa mengalami masalah, masyarakat Bali menanggung semua kerugian, melalui pemberian fasilitas kepada pelaku usaha pariwisata. Pemerintah juga tidak bisa memberikan subsidi yang besar kepada korban-korban PHK pariwisata. Pada kapitalisme yang sempurna seharusnya pemerintah mampu memerankan diri sebagai pengaman sosial melalui pajak yang besar kepada pengusaha. Pajak ini digunakan untuk membangun ekonomi rakyat yang terpinggirkan dan tabungan pada masa-masa krisis, tetapi hal ini sama sekali tidak terjadi. Karena itu, pada masa untung, masyarakat Bali mendapatkan bagian kurang dan pada masa krisis tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai (Bhaskara & Filimonau, 2021); (Utama et al., 2020).

Regulasi pemerintah daerah Bali menyandarkan pariwisata Bali pada falsafah Tri Hita Karana, yaitu keharmonisan (Pemerintah Provinsi Bali, 2012), tetapi pada kenyataannya konsep ini dimarjinalisasikan mulai dari promosi yang menekankan kepada ideologi pasar (Astiti et al., 2015). Hal ini menunjukkan dalam skala besar falsafah Tri Hita Karana tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pada kasus pariwisata pedesaan di Sudaji, Buleleng (Surya Triana Dewi, 2019), falsafah Tri Hita Karana bisa dilaksanakan dengan baik, sebab harmoni dengan lingkungan dan masyarakat lokal. Keharmonisan ini bermuara kepada keuntungan ekonomi local. Standar-standar Tri Hita Karana dalam pariwisata pedesaan ini adalah standar-standar pariwisata berkelanjutan. Karena itu, pariwisata berkelanjutan hanya bisa dilaksanakan dalam pariwisata berskala kecil yaitu pariwisata pedesaan. Pariwisata pedesaan ini juga bisa dibatasi sehingga memungkinkan untuk melakukan protocol kesehatan pada era new normal. Pembatasan ini memberikan ruang kepada usaha-usaha kecil seperti pada kasus Thailand (Fuchs, 2022). Masyarakat local, ekonomi local, dan lingkungan adalah standar-standar dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Karena itu, pariwisata berskala kecil adalah pariwisata yang sesuai dengan Perda tentang Kepariwisata Budaya Bali.

Analisis ini menunjukkan bahwa Bali perlu mulai memikirkan pariwisata berskala kecil. Potensi-potensi desa perlu dikembangkan menjadi pariwisata berskala kecil. Kasus seperti Sudaji, Buleleng perlu dijadikan bentuk pengembangan pariwisata pedesaan. Kasus Ubud, Gianyar, adalah pariwisata pedesaan, tetapi pada perkembangannya investasi hotel-hotel berbintang menyerang Ubud sehingga homestay-homestay milik warga mengalami ancaman. Pengusaha homestay ini ternyata memiliki ketahanan yaitu keunikan dari pengelola homestay (Pitanatri & Pitana, 2019). Karena itu, dalam pengembangan pariwisata pedesaan ini, keunikan harus kuat. Keunikan itu tidak hanya menyangkut atraksi tetapi juga pelayanan. Pada kasus homestay di Ubud, pelayanan pemilik homestay yang otentik sebagai orang Bali asli merupakan keunggulannya. Keunggulan seperti ini menjadi cermin untuk mengembangkan pariwisata berskala kecil melawan pariwisata massal.

Peluang pengembangan pariwisata berskala kecil ini muncul pada era new normal. Penggunaan teknologi informasi yang merata memberikan peluang promosi yang sama kepada pariwisata berskala kecil. Investasi yang tidak terlalu besar juga memungkinkan untuk lincah bermain, dengan bisa mengambil pasar-pasar khusus. Kecenderungan baru dalam dunia pariwisata yaitu mendapatkan pengalaman natural untuk hidup lebih baik (Astiti et al., 2015) merupakan peluang dalam membangun pariwisata berskala kecil ini. Pariwisata pedesaan memberikan pengalaman untuk hidup dekat dengan alam, sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat, terutama dalam menjaga keberlangsungan alam. Bentuk-bentuk kehidupan seperti itu merupakan bentuk-bentuk yang diharapkan wisatawan untuk menjadi inspirasi bagi kehidupan masyarakat modern.

Pemerintah harus memberikan perhatian kepada bentuk-bentuk pariwisata berskala kecil ini, sebab sudah terbukti pariwisata massal tidak bisa menyelamatkan Bali pada masa-masa krisis. Pariwisata berskala kecil ini bisa dibangun dalam sistem pembangunan yang berbasis Tri Hita Karana, yang menjaga keberlangsungan sosial kultural dan lingkungan Bali. Lembaga-lembaga

tradisional seperti Subak bisa masuk ke dalam system ini sehingga memiliki penjaminan sosial yang baik, melalui sistem keamanan produk-produk makanan sehingga pada masa-masa krisis, masyarakat tidak mengalami masalah dasar yaitu kekurangan pangan. Pola seperti itu bisa dikembangkan melalui pariwisata pedesaan yang berbasis pertanian sehingga pertanian tetap terjaga dalam perkembangan pariwisata. Perhatian dan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan pariwisata berskala kecil ini diperlukan, sebab tanpa keberpihakan akan dikalahkan pemodal-pemodal besar.

5. Kesimpulan

Pasca pandemi, pariwisata Bali perlu mengambil bentuk pembangunan pariwisata berskala kecil. Contohnya adalah bentuk pariwisata di Desa Sudaji, Buleleng. Bentuk ini memenuhi syarat-syarat pariwisata berkelanjutan yaitu ekonomi local, masyarakat local, dan konservasi lingkungan. Pariwisata berskala kecil membuat ekonomi masyarakat lokal bertumbuh tanpa saingan raksasa ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal mendorong pengembangan sumber daya masyarakat lokal. Pengembangan sumber daya masyarakat local mendorong perhatiannya terhadap konservasi lingkungan. Bentuk pariwisata berskala kecil ini juga sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana, yaitu berbasis etika (parahyangan), masyarakat local (pawongan), dan palemahan (lingkungan). Karena itu, falsafah Tri Hita Karana bisa dilaksanakan dengan baik pada konteks pembangunan pariwisata berskala kecil. Pelaksanaan ini juga mendukung isu-isu pembangunan pariwisata global yaitu pariwisata berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata berskala kecil ini, perlu mendapatkan perhatian pemerintah sehingga pariwisata bentuk ini tidak menjadi seperti Ubud. Bentuk Ubud telah menjadi pariwisata massal karena perkembangan pemodal-pemodal besar di desa tersebut. Perkembangan ini memarginalkan usaha-usaha ekonomi local, tetapi masyarakat Ubud masih memiliki celah dalam mengembangkan homestay karena keunikan pelayanan yang diberikan. Peluang masyarakat Ubud ini tentu dibagi dengan kapitalisme global yang berkembang. Pembagian peluang ini mengurangi kesempatan masyarakat lokal dan menimbulkan keterdesakan ruang sehingga Ubud menjadi padat dan penuh kemacetan. Bentuk seperti ini pada masa mendatang akan berlawanan dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian kepada pembangunan pariwisata berskala kecil yang terbukti mampu bertahan pada masa-masa sulit.

Paper ini ditulis dalam waktu terbatas sehingga baru memberikan gambaran-gambaran kecil dalam kasus wisata pedesaan. Eksprimen-eksprimen lanjutan dalam membangun bentuk pariwisata ini perlu terus dilakukan sehingga bentuk pariwisata berskala kecil terutama dalam ketahanannya menghadapi masa-masa sulit semakin teruji. Jika eksprimen-eksprimen ini terus berlanjut, Bali akan menjadi bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di tengah arus besar pariwisata massal. Arus besar ini telah terbukti tak tahan pada masa-masa sulit sehingga pariwisata berkelanjutan memerlukan bentuk pembangunan pariwisata yang ideal sehingga menjadi contoh bagi masyarakat dunia. Bali memiliki konsep dan falsafah yang luhur, tetapi untuk menjadi teladan diperlukan implementasi dari konsep dan falsafah luhur itu ke dalam aksi-aksi nyata.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si atas saran dan fasilitasnya. Ucapan Terima Kasih juga disampaikan kepada komunitas Satupena yang telah menjadi wadah untuk mempertemukan ide-ide tentang pembangunan Bali di berbagai bidang kehidupan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung penelitian ini, hingga terbit menjadi artikel ilmiah.

7. Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh tim peneliti yang terdiri I Gede Sutarya dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, I Nengah Suardhana dari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, dan I Gusti Bagus Rai Utama dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Bali.

8. Konflik Kepentingan

Gagasan dan hasil penelitian ini tidak menimbulkan konflik kepentingan karena penelitian ini tidak terkait dengan isu kesehatan atau kepentingan lain yang berhubungan dengan ras, suku, agama, dan politik praktis.

Daftar Pustaka

- Anggana, I. P. S., Mudana, I. G., Triyuni, N. N., & Sukmawati, N. M. R. (2022). Tri Hita Karana as a form of pro-environmental behavior in Bindu Traditional Village. *International Journal of Green Tourism Research and Applications*, 4(1), 30–37.
- Astiti, S., Wayan, N., Windia, W., & Lestari, P. F. K. (2015). Penerapan Tri Hita Karana untuk Keberlanjutan Sistem Subak yang Menjadi Warisan Budaya Dunia: Kasus Subak Wangaya Betan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(1), 26290.
- Benjamin, S., Dillette, A., & Alderman, D. H. (2020). “We can’t return to normal”: committing to tourism equity in the post-pandemic age. *Tourism Geographies*, 22(3), 476–483.
- Bhaskara, G. I., & Filimonau, V. (2021). The COVID-19 pandemic and organisational learning for disaster planning and management: A perspective of tourism businesses from a destination prone to consecutive disasters. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 46, 364–375.
- Dewi, P. S. T. (2019). Model of Sustainable Tourism Village Development in Bali (Case Study: OMunity Bali in Sudaji Village, Sawan Sub-district, Buleleng District). *KnE Social Sciences*, 642–657.
- Dubois, G., Bossew, P., Tollefsen, T., & De Cort, M. (2010). First steps towards a European atlas of natural radiation: status of the European indoor radon map. *Journal of Environmental Radioactivity*, 101(10), 786–798.
- Fuchs, K. (2022). Small Tourism Businesses Adapting to the New Normal: Evidence From Thailand. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal*, 70(2), 258–269.
- Hitchcock, M., & Putra, I. (2007). *Tourism, development and terrorism in Bali*.
- Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. *Journal of Sustainable Tourism*, 11(6), 459–475.
- Melo, M., Coelho, H., Gonçalves, G., Losada, N., Jorge, F., Teixeira, M. S., & Bessa, M. (2022). Immersive multisensory virtual reality technologies for virtual tourism. *Multimedia Systems*, 28(3), 1027–1037.
- Nhuta, S. (2015). *Tourism and sustainable development: perspectives and learning for sustainable future: Paper presented at the Midlands State University International Conference in Victoria Falls*.
- Nie, Q., Qian, X., Guo, S., Jones, S., Doustmohammadi, M., & Anderson, M. D. (2022). Impact of COVID-19 on paratransit operators and riders: A case study of central Alabama. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*.
- Pitana, I. (2010). Tri Hita Karana—the local wisdom of the Balinese in managing development. In *Trends and issues in Global Tourism 2010* (pp. 139–150). Springer.
- Pitana, I Gde, & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Pitana, I Gede. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pitanatri, P. D. S., & Pitana, I. G. (2019). What Do We Know About Flashpacker? A Review. *The 3rd Bali International Tourism Conference, September*, 23–33.
- Pramono, J. (2016). The process of environmental management at star rated hotel in Bali. *Tourism & Sustainable Regional Development In Indonesia*, 20–32.
- Ruastiti, N. M. (2015). Membongkar Makna Pertunjukan Tari sang Hyang Dedari di Puri saren Agung Ubud, Bali pada Era Global. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 1(1).

- Schutte, F., & Chauke, T. (2022). *The impact of digital marketing on consumer behaviour: a case study of Millennials in South Africa*.
- Setokoe, T. J., & Ramukumba, T. (2022). Ability to do for self; A rural community's view of the importance of capacity building in sustainable tourism development. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 41(2), 583–588.
- Udayana, A. A. G. B. (2017). Marginalisasi Ideologi Tri Hita Karana Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Di Bali. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 32(1).
- Utama, I. G. B. R. (2015). Preferensi Wisatawan Senior Terhadap Pemilihan Aktivitas Wisata Pada Sebuah Destinasi.
- Utama, I. G. B. R., Krismawintari, N. P. D., Komalasari, Y., & Patni, N. L. P. S. S. (2022). Exploring Policies and Strategies to Minimize Economic Leakages in the Tourism Sector Experiences in Many Countries. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(2), 813–827.
- Utama, I. G. B. R., Laba, I. N., Junaedi, I. W. R., Krismawintar, N. P. D., Turker, S. B., & Juliana. (2021). Exploring Key Indicators of Community Involvement in Ecotourism Management. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(3), 808–817. [https://doi.org/10.14505//jemt.12.3\(51\).20](https://doi.org/10.14505//jemt.12.3(51).20)
- Utama, I. G. B. R., & Trimurti, C. P. (2020). *Etika Pengembangan Agrowisata Pada Kawasan Perbatasan Hutan Konservasi*. Deepublish.
- Utama, I. G. B. R., Turker, S. B., Widyastuti, N. K., Suyasa, N. L. C., & Waruwu, D. (2020). Model of Quality Balance Development of Bali Tourism Destination. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3671267>
- Utama, I. G. B. R., Wirateja, A. A. B., & Turker, S. B. (2021). Stakeholders Recovery Strategy of Bali Tourism Sector in the Post-Pandemic New Normal Era. *International Journal of Current Science Research and Review*, 4(11), 1563–1571.